



# Betor Bakal Ditata, Becak Listrik Ditambah

**JOGJA**—Pemda DIY bakal menata keberadaan becak motor (betor) di kawasan Malioboro Jogja untuk mendukung terwujudnya *low emission zone*.

Lugas Subarkah  
lugas@harianjogja.com

Seiring dengan penataan itu, Pemda DIY akan menambah jumlah becak listrik untuk menggantikan betor. Dinas Perhubungan DIY menargetkan penambahan becak listrik pada 2026 setidaknya 50 unit. Hal ini untuk mendukung terwujudnya *low emission zone* di Malioboro, dengan mengonversi becak motor ke becak listrik. Kepala Dinas Perhubungan DIY,

Chrestina Erni Widyastuti, menjelaskan *low emission zone* Malioboro terus diupayakan, salah satunya dengan penambahan jam pedestrian. Dari yang sebelumnya tiga jam pada pukul 18.00 WIB-21.00 WIB menjadi lima jam, yakni pukul 17.00 WIB-22.00 WIB. "Sekarang jam operasionalnya sudah mulai diperpanjang, dengan harapan aktivitas kendaraan bermotor

di kawasan itu bisa semakin berkurang setiap harinya. Saat ini memang area tersebut ditujukan untuk kendaraan non-motor," ujarnya, Jumat (24/10). Dalam konsep *low emission zone*, kendaraan yang diizinkan beroperasi di Malioboro sebenarnya hanya becak kayu, andong dan becak listrik.

- **Populasi betor sekarang masih banyak, jauh lebih banyak dibanding becak listrik yang baru ada 90 unit.**
- **Pengemudi becak berharap pemerintah bisa menata kawasan Malioboro agar tidak dipenuhi betor.**

► Halaman 10

## Betor Bakal...

Sedangkan betor tidak diperbolehkan karena masih menggunakan bahan bakar fosil. "Namun memang masih ada beberapa yang belum patuh, seperti pengendara betor. Hal ini terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan kebijakan pemerintah untuk mengurangi polusi di kawasan tersebut," katanya.

Ia mengakui populasi betor sekarang masih banyak, jauh lebih banyak dibanding becak listrik yang baru ada 90 unit. Dishub pun berupaya menata betor di Malioboro, tetapi secara bertahap. "Kalau tidak dilakukan penataan, nanti pengaturannya jadi tidak terarah. Jadi memang harus ada langkah-langkah penerbitan," ungkapnya.

Untuk itu penambahan becak listrik pun terus diupayakan, yang targetnya pada 2026 akan ada penambahan 50 unit. "Pemerintah daerah, seperti yang sudah disampaikan Sekda DIY, memang berencana untuk menambah jumlah becak listrik dengan bekerja sama dengan pihak swasta maupun BUMN," kata dia.

Sebanyak 50 unit tersebut akan didanai oleh APBD baik Pemda DIY maupun Pemkot Jogja. Di luar itu, penambahan becak listrik juga diupayakan melalui kerja sama dengan pihak lain termasuk pihak internasional. "Perencanaannya sekitar 50 unit. Tapi karena dana terbatas, kita berupaya menggandeng mitra agar jumlahnya bisa lebih banyak lagi," ujarnya.

Kemudian Pemda DIY juga berupaya menambah bus listrik, yang usulannya pada tahun depan ditambah sebanyak dua unit, sehingga totalnya dengan yang sudah ada jadi empat unit. "Tinggal nanti kita lihat hasil

kerja sama dengan pihak swasta seperti apa, karena keputusan akhirnya akan ditentukan tahun depan," jelasnya.

Ia berharap penambahan becak listrik dan bus listrik bisa berjalan beriringan untuk mewujudkan Malioboro sebagai *low emission zone*. "Semua sedang diupayakan, meskipun dari sisi anggaran termasuk Dana Keistimewaan saat ini menurun, jadi kemungkinan belum bisa terealisasi seluruhnya. Karena masih banyak program lain yang juga menjadi prioritas," katanya.

Ia juga memastikan tetap ada anggaran untuk pemeliharaan termasuk Stasiun Pengisian i Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk becak listrik. "Untuk SPKLU memang ada pemeliharannya. Tapi kalau becak listriknya menjadi tanggung jawab masing-masing koperasi," ungkapnya.

## Peran Swasta

Sementara itu, perwakilan Paguyuban Becak Listrik, Paimin Ahmad Sarjono, menjelaskan saat ini ada 90 unit becak listrik dari pengadaan 2023 sebanyak 50 unit dan memiliki tiga koperasi, kemudian dari pengadaan 2024 sebanyak 40 unit yang juga memiliki tiga koperasi.

Selama kurang-lebih dua tahun pemakaian, menurutnya tidak ada kerusakan signifikan dan masih bisa diperbaiki di tempat produksinya. "Kemarin sempat ada peninjauan ulang dari tim gabungan—UGM, Dinas Perhubungan. Untuk produksi tahun 2024, komponennya memang dijamin selama satu tahun. Kalau ada kerusakan yang tidak disengaja, bisa langsung diganti," katanya.

Untuk stasiun pengisian daya

di Ketandan, pengemudi becak listrik jarang memanfaatkannya karena menurutnya ada kerusakan dan mereka bisa mengisi daya di mana saja. Ditambah lokasi itu sekarang sedang ada pembangunan area parkir Ketandan sehingga menyulitkan akses masuknya. "Masih ada, tapi kondisinya sudah rusak. Jadi kami jarang pakai. Biasanya kalau mau isi daya, saya minta izin saja di tempat lain. Saya sering *ngecharge* di daerah Pakuncen, di rumah makan. Enggak masalah, karena enggak menghabiskan banyak becak listrik juga," ungkapnya.

Ia juga berharap pemerintah bisa menata kawasan Malioboro agar tidak dipenuhi becak motor (betor) dan menambah becak listrik. "Sudah pernah dibahas juga, katanya akan ada penerbitan untuk becak motor yang beroperasi di kawasan Malioboro. Prinsipnya, kendaraan yang menggunakan BBM memang tidak boleh beroperasi di sana," ujarnya.

Menurutnya, becak listrik harus ditambah. Hotel-hotel menurutnya juga bisa berkontribusi untuk mendukung hal ini. "Kalau hanya segitu, belum cukup. Dinas Pariwisata juga seharusnya ikut mendorong hotel-hotel berbintang agar menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti becak listrik untuk melayani tamu, bukan becak motor," katanya.

Namun sampai saat ini ia belum mendengar informasi penambahan becak listrik dari pemerintah. Jika nantinya ada penambahan, ia memberi masukan dari sisi rem perlu ditingkatkan. "Sekarang masih pakai rem cakram motor, satu di bagian belakang. Sebenarnya cukup kuat, tapi untuk jarak jauh atau jalan menurun sebaiknya ditambah sistem pengaman rem," ujarnya.

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005